

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### 1. Buku-Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Poernomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasarakatan*, Liberty, Yogyakarta.
- Burhan Ashofa, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Djisman Samosir, 2016, *Penologi dan Pemasarakatan*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Harsono H. S., 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Solo.
- J. Robert Lilly, 2015, *Teori Kriminologi Konteks dan Konsekuensi*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Kusno Adi, 2009, *Kebijakan kriminal dalam penanggulangan tindak pidana narkotika oleh anak*, Umm Press, Malang
- Lamintang, P.A.F, dan Theo Lamintang, 2012, *Hukum Penitensir Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Made Wiratha, 2006, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian*, Skripsi dan Tesis, L Andi Press, Yogyakarta.
- Moh. Taufik Makaro, dkk, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia, Jakarta.
- Muladi, 2002, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung.
- O.C. Kaligis Associates, 2002, *Narkoba dan Peradilannya Di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundang dan Peradilan*, Bandung Alumni.
- Samosir, Djisman, 1992, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.

Siswanto S, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Rineka Cipta, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta.

Zainal Abidin, 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP*, Elsam, Jakarta.

Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **2. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasarakatan.

## **3. Jurnal, Tesis, dan Makalah**

Departemen Hukum dan HAM RI, 2004, *Pedoman Perawatan Kesehatan Warga Binaan Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara*, Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Jakarta.

Fransiska Novita Eleanora, 2011, “Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan dan Penanggulangannya”, jurnal hukum Vol. XXV, No. 1, Universitas MPU Tantular, Jakarta.

J.J.M. Wuisman, 1996, “Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas”, Jilid I, Jakarta, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

M. Tavip, 2009, “Pelaksanaan Therapeutic Community Dan Rehabilitasi

Terpadu Bagi Narapidana Narkotika Dan Psikotropika Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan Dihubungkan Dengan Tujuan Sistem Pemasyarakatan”, tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan.

Nur Mustafidah, 2012, ”Latar Belakang Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Narapidana dan Pembinaannya di Lapas Narkotika Klas II A Nusakambangan”, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang.

Sri Rahayu Amri, 2018, “*Efektivitas Pembinaan dan Fungsi Pemasyarakatan Pecandu Narkoba*”, *Jurisprudentie*”, Volume 5 Nomor 2, Akademi kebidanan (Akbid) Muhammadiyah palopo.

